

## EFEKTIVITAS MAJELIS TAKLIM DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

**Mukhtar Mas'ud**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [muhtarmas'ud@iainpare.ac.id](mailto:muhtarmas'ud@iainpare.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The basis for organizing the Taklim Council, among others, are Government policies, financing, namely funding sources, the function of education management in the implementation of the Taklim Council, the use of human resources, and members and students of the Taklim Council. The challenges of organizing the Taklim Assembly include: the era of globalization, human moral decadence, and the prioritization of world affairs that can provide something material and less inclined to pursue amaliyah for preparation and provision in the hereafter. Expectations in the organization of the Taklim Council, among others: building people of faith and increasing intelligence in the field of religion, increasing friendship and Ukhudah Islamiyah relations, and the center of knowledge in society, namely the holding of the Taklim Council provides great hope for Muslims, namely the information center for the development of knowledge Islam, Islamic knowledge development center, and Islamic religious consultation center.*

**Keywords:** *Taklim Council, religious education*

### **ABSTRAK**

Dasar penyelenggaraan Majelis Taklim, di antaranya adalah kebijakan Pemerintah, pembiayaan, yakni sumber pembiayaan, fungsi manajemen

pendidikan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, pemanfaatan sumber daya manusia, dan anggota sekaligus peserta didik Majelis Taklim. Tantangan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, antara lain: era globalisasi, dekadensi moral manusia, dan pengutamaan urusan dunia yang dapat memberikan sesuatu yang bersifat materi dan kurang kecenderungan mengejar amaliyah untuk persiapan dan bekal di akhirat kelak. Harapan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, di antaranya: membangun manusia yang beriman dan meningkatkan kecerdasan dalam bidang agama, peningkatan hubungan silaturrahmi dan *Ukhuwah Islamiyah*, dan pusat ilmu dalam masyarakat, yakni penyelenggaraan Majelis Taklim memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni pusat informasi perkembangan pengetahuan Islam, pusat pembinaan pengetahuan Islam, dan pusat konsultasi agama Islam.

**Kata Kunci:** majelis taklim, pendidikan keagamaan

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Majelis Taklim yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Penyelenggaraan Majelis Taklim yang merupakan pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat Islam agar dapat terintegrasi dalam kehidupan beragama. Integrasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan Majelis Taklim harus menjadi banteng dalam masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di luar sekolah.

Penyelenggaraan Majelis Taklim telah dilegitimasi oleh Pemerintah, di antaranya termaktub di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan KMA No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Legitimasi tersebut sebagai indikator bahwa penyelenggaraan Majelis Taklim di Indonesia memiliki ruang gerak

yang luas. Jika seandainya Pemerintah tidak melegitimasi penyelenggaraan dan eksistensinya, maka akan berimplikasi pada implementasi Majelis Taklim di lapangan, yakni kepedulian masyarakat akan berkurang mengingat adanya rasa kewaspadaan yang tinggi akan dampak sosial yang diterimanya. Misalnya, mendapat sorotan dan atau hambatan dari suatu lingkungan yang tingkat religiusnya masih rendah.

Penyelenggaraan Majelis Taklim tidak luput dari tantangan yang dihadapinya, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak profesional atau memiliki niat yang tidak relevan dengan tujuan dan fungsi majelis taklim, akan tetapi memiliki tujuan lain. Majelis Taklim sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Padahal penyelenggaraan Majelis Taklim bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang agama. Kendala lain adalah pengaruh era globalisasi saat ini yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Islam. Seperti halnya saat ini, penggunaan internet memberikan manfaat positif namun juga memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan aspek apektif terutama kepada generasi muda. Dampak tersebut menjadikan manusia memiliki dekadensi moral sehingga mempengaruhi proses penyelenggaraan Majelis Taklim sehingga perhatian pada pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi hal yang utama, melainkan sebagai suatu kegiatan seremonial. Dengan legitimasi yang diberikan Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan potensi yang perlu dibina dan dikembangkan secara kontinyu dan komprehensif.

Kendala dalam proses penyelenggaraan Majelis Taklim tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat menyelenggarakannya. Karena kendala yang ada menjadi pertimbangan dalam setiap langkah penyelenggaraan agar dapat berlangsung dengan baik walaupun dinamika Majelis Taklim tidak luput dari faktor penghambat. Usaha maksimal dalam upaya mengatasi kendala adalah bagaimana mengatasi paradigma masyarakat bahwa eksistensi Majelis Taklim adalah perkumpulan wanita muslim untuk mengadakan kegiatan silaturrahmi dan arisan. Padahal, tujuan utama penyelenggarannya adalah untuk meningkatkan *ta'lim* yakni pengetahuan

Islam dan *ta'dif*, yakni moral dan tingkah laku manusia agar lebih baik sesuai dengan kaidah Islam dan norma sosial kemasyarakatan lainnya.

Penyelenggaraan Majelis Taklim memiliki suatu harapan besar bagi umat Islam, yakni membangun manusia yang beriman dan memiliki pengetahuan dan wawasan keislaman. Eksistensi Majelis Taklim memberikan suatu harapan bagi umat Islam, apabila pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan sosial dan manajemen. Pendekatan sosial yang dimaksudkan adalah penyelenggara Majelis Taklim mampu melakukan hubungan dan komunikasi di sekitar Majelis Taklim berada agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dan pendekatan manajemen yang dimaksud adalah penyelenggara Majelis Taklim mampu mengelola organisasi secara optimal dengan pendekatan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan/pergerakan), dan *controlling* (pengawasan). Dengan melakukan pendekatan tersebut, pembinaan dan pengembangan Majelis Taklim memberikan suatu harapan bagi umat Islam, bangsa, dan Negara RI.

## PEMBAHASAN

### **Efektivitas Majelis Taklim Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan**

#### **A. Dasar Penyelenggaraan**

##### **1. Kebijakan Pemerintah**

Penyelenggaraan Majelis Taklim diselenggarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah, antara lain:

###### **a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

###### **Pasal 1 butir 2:**

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

**Pasal 1 butir 12:**

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

**Pasal 1 butir 16:**

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

**Pasal 3:**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

**Pasal 30 ayat:**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera*, dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 55 ayat (1):**

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

**b. PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan****Pasal 8 ayat:**

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

**Pasal 23 ayat:**

(1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

(2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., serta akhlak mulia.

(3) Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

**c. KMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam****Pasal 1:**

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam.

3 Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmiliyah, pendidikan al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sebagainya.

10. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.

## **Pasal 2:**

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

- a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, dan
- c. Mengembangkan pribadi *ahlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

## **2. Pembiayaan**

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim merupakan kebutuhan mendasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan

pendidikan keagamaan dalam masyarakat. Karena tanpa pembiayaan yang cukup, maka implementasi Majelis Taklim tidak dapat dilakukan secara optimal. Pembiayaan Majelis Taklim akan mendorong pelaksanaan dan motivasi kerja secara optimal. Sumber pembiayaan Majelis Taklim bersumber dari anggota Majelis Taklim, organisasi, instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat. Pemanfaatan dana Majelis Taklim yang ada harus tepat sasaran untuk terwujudnya program Majelis Taklim. Dan untuk menggunakan pembiayaan Majelis Taklim dilakukan secara terbuka bahkan diperlukan musyawarah dan kebersamaan untuk menentukan penggunaan dana yang ada.

Penggunaan dana dalam pembiayaan Majelis Taklim adalah:

- a. Penggunaan dana keperluan organisasi
- b. Penggunaan dana keperluan pembinaan dan pengembangan.
- c. Penggunaan dana komsumsi dan penyelenggaraan acara.

Untuk terselenggaranya pembiayaan dengan akuntabilitas, maka setiap setiap enam bulan dilakukan rapat atau musyawarah yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan Majelis Taklim agar tidak terjadi kekosongan dana atau adanya utang Majelis Taklim.

### 3. Fungsi Manajemen Pendidikan

Dalam rangka mencapai tujuan Majelis Taklim secara efektif, manajemen pendidikan seyogyanya difungsikan. Syafaruddin (2003), menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan Georger R. Terry (1978), telah menyederhanakan fungsi manajemen, terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dilihat dari prosesnya fungsi manajemen tersebut dapat dianggap cukup bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materil melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>1</sup>

Fungsi manajerial yang terdapat dalam proses kegiatan Majelis Taklim, adalah: (1) fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar terbebas dari kebodohan; (2) fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan; (3) fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah; dan (4) fungsi religius, sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugrahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Fungsi yang diatur oleh agama yang wajibkan umatnya untuk mencari suatu ilmu dan menghindarkan diri dari aspek kebodohan. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan sebagai pemaknaan universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas.<sup>2</sup>

Menurut Buchari Zainun, ada beberapa prinsip organisasi dan manajemen, sebagai berikut:

- a. Sesuatu kebijakan mengandung tujuan atau misi dari organisasi yang harus diberitahukan kepada pihak yang bertanggungjawab mencapainya. Dengan tujuan ini dapat diukur efisiensi kerja organisasi.
- b. Semua pekerjaan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan harus terperinci, terencana, serta diatur dengan sistematis hingga akibat duplikasi dan pemborosan dapat dibatasi, bahkan dalam beberapa hal duplikasi dapat dihindari.

---

<sup>1</sup>Sagaf, *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta; Ip4m, 2009), h. 46.

<sup>2</sup>Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 18.

- c. Tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab yang hendak diserahkan kepada petugas atau pejabat yang bertanggungjawab, rinciannya harus jelas dan dipahami.Tetapi untuk menjaga fleksibilitas dan timbulnya kemungkinan lain, maka kemungkinan diizinkan menambah perincian dengan tugas yang lain.
- d. Pemberian tugas dan wewenang harus disertai dengan wewenang yang seimbang. Sedapatnya wewenang tersebut berada di mana tugas dilaksanakan.
- e. Perlu adanya struktur organisasi sebagai gambaran dari hubungan wewenang dan tanggungjawab yang dapat dipergunakan sebagai alat penyalur tugas, tanggungjawab, dan wewenang, informasi, sumberdaya, dan perintah.
- f. Setiap organisasi atau bagian organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai syarat kecakapan yang sesuai. Pemimpin yang cakap itu, semestinya orang yang mempunyai kemampuan melihat keseluruhan dari tujuan kesatuan organisasi yang dipimpinnya.
- g. Koordinasi yang sempurna harus dipelihara dalam organisasi baik di antara anggota maupun kelompok pekerja dan satuan kerjanya agar sinergitas dalam berorganisasi berjalan dengan baik.
- h. Organisasi hanya alat, karena itu harus disesuaikan kebutuhan tuntutan dansituasi. Perubahan suatu organisasi/reorganisasi hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh organisasi.Dan harus pula dijaga perubahan organisasi untuk tidak berhasil mengganggu stabilitas kerja berorganisasi dalam upaya mempengaruhi moral dan semangat kerja anggota organisasi.<sup>3</sup>

Secara eksplisit dikemukakan bahwa suatu sistem itu lebih cenderung bersifat terbuka. Hal ini dinyatakan dengan adanya aspek lingkungan yang berhubungan erat dengan bagian dari sistem yang

---

<sup>3</sup>B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.

berperan. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka, tujuan organisasi mempunyai kebergantungan. Prinsip yang digunakan dalam manajemen berdasarkan sistem: (1) manajemen berdasarkan sasaran; (2) manajemen berdasarkan teknik; (3) manajemen berdasarkan struktur; (4) manajemen berdasarkan orang; dan (5) manajemen berdasarkan informasi.

Pendekatan sistem merupakan suatu metode atau teknik analisis yang secara khusus disebut analisis sistem (*system analysis*) terutama berfungsi dalam pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam hal ini pendekatan sistem dikaitkan dengan metode ilmiah. Analisis sistem ini mencakup: (a) menyadari adanya masalah; (b) mengidentifikasi variabel yang relevan; (c) menganalisis faktor-faktor; dan (d) menentukan kesimpulan dalam bentuk program kegiatan.

Fungsi Manajemen Pendidikan adalah:

a. *Planning* (Perencanaan)

Muhammad Fikry (1978), menguraikan bahwa perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan adalah proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan adalah upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan *resources* yang ada. Dan, Fakry Gaffar, mengartikan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun secara sistematis, rasional, dan dapat diberlakukan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.

Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip penyusunan organisasi berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Di antara prinsip ortganisasi yang tersurat dalam QS.Al-Maidah/5: 2

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>4</sup>

Dan QS. At-Thalaq/65 : 7

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam, diperlukan organisasi. Rasulullah saw. bersabda bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada seorang shalat sendirian. Arti hadis ini mengisyaratkan bahwa keutamaan shalat berjamaah sama halnya dengan berorganisasi dengan baik. Kesulitan dapat dipermudah apabila dipikul bersama. Aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hidup secara berjamaah atau berorganisasi, lebih besar keuntungannya daripada tanpa berorganisasi atau berjamaah.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam berorganisasi harus ada prinsip tertentu agar pelaksanaan kegiatan organisasi tercapai sesuai dengan tujuan. Prinsip organisasi menurut Manulang,<sup>6</sup> yakni (a) adanya tujuan yang jelas, yakni tujuan organisasi harus ditetapkan sebelum perencanaan kegiatan dirumuskan karena rencana harus merujuk dan mengarah pada upaya tercapainya tujuan organisasi; (b) prinsip kerjasama, yakni tolok-ukur kesuksesan organisasi adalah adanya kerjasama di antara semua anggota organisasi.

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan)

Pergerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar ikhlas

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 818.

<sup>6</sup>Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 187-188.

bekerja sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pentingnya unsure manusia, jelas terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan hidup manusia. Tepat tidaknya strategi dasar telah ditetapkan sebagai penunjuk arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan itu hanya bermakna apabila diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Karena itulah tidak dapat dipungkiri kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa sentralnya posisi manusia dalam organisasi, agar mereka mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan atau *controlling* adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengarahan dilakukan pimpinan organisasi.<sup>8</sup> Menurut Murdick, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap: (a) menetapkan standar pelaksanaan; (b) pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar; dan (c) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standard dan rencana.<sup>9</sup>

#### 4. Pemanfaat Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Majelis Taklim sangat diperlukan untuk terlaksananya seluruh aktivitas Majelis Taklim. Apabila penyelenggara suatu Majelis Taklim tidak menggunakan tenaga dan pengurus yang tidak memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan oleh fungsi dan tujuan Majelis Taklim, maka *susnability* Majelis Taklim tidak dapat terwujud secara komprehensif dan bermutu. Akan tetapi diselenggarakan dengan apa adanya. Penyelenggaraan Majelis

---

<sup>7</sup>Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 129.

<sup>8</sup>Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 137.

<sup>9</sup>Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 101.

taklim seperti ini biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang bukan tujuan pengetahuan Islam sebagai pilar utama. Pemanfaatan sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan suatu Majelis Taklim sebagai pengembangan misi pendidikan dan dakwah dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan pengetahuan agama Islam.

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu Majelis Taklim terdiri dari 2 unsur:

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengorganisasian, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan organisasi Majelis Taklim. Biasanya yang dibutuhkan dalam pengorganisasian adalah orang yang memahami manajemen pendidikan atau memiliki pengetahuan manajerial yang tinggi dan atau memiliki kualifikasi ilmu manajemen pendidikan. Orang tersebut diyakini mampu membawa Majelis Taklim dapat berkembang dan bertahan secara optimal dan kontinyu
- b. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pembinaan, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembinaan kepada peserta didik atau anggota Majelis Taklim. Apabila pemanfaatan sumber daya manusia tidak memperhatikan kompetensi pembina, maka kualitas dan output peserta didik tidak akan bermutu. Untuk itu dibutuhkan tenaga yang mampu membina peserta didik atau anggota Majelis Taklim dari aspek keilmuan dan keislaman. Biasanya yang dibutuhkan dalam pembinaan Majelis Taklim adalah orang yang memiliki kualifikasi ilmu agama Islam yang cukup baik dan mampu mengkomunikasikan kepada peserta didik Majelis Taklim.

## 5. Peserta Didik

Anggota Majelis Taklim dikategorikan sebagai peserta didik yang pada waktu tertentu mendapat bimbingan dari ustaz yang memberikan ceramah agama atau sebagai narasumber dalam pertemuan Majelis Taklim. Namun peserta didik Majelis Taklim memiliki perbedaan peserta didik lembaga pendidikan formal. Peserta didik Majelis umumnya adalah orang

dewasa, sedangkan peserta didik lembaga formal pada umumnya usia anak dan remaja. Karena Majelis Taklim pada umumnya orang dewasa dan sudah berkeluarga, maka pembina harus mampu melakukan adaptasi dengan peserta didik seperti ini. Apabila pembina mempelakukan peserta didik Majelis Taklim sama dengan peserta didik lembaga pendidikan formal, maka penyelenggaraan Majelis Taklim mengalami hambatan pembinaan dan finanlial. Hambatan pembinaan yang terjadi adalah minat peserta didik akan berkurang untuk melakukan pertemuan yang diadakan Majelis Taklim. Dan hambatan pembinaan yang terjadi adalah kurangnya perhatian peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan Majelis Taklim yang sedang berjalan.

Dengan demikian peserta didik turut memberikan andil atas penyelenggaraan Majelis Taklim. Penyelenggara Majelis Taklim dengan peserta didik yang sekaligus anggota Majelis Taklim ada *feedback* antara keduanya dan saling memerlukan sehingga Majelis Taklim dapat dilangsungkan secara kontinyu.

## 6. Kebersamaan Umat Islam

Kebersamaan umat Islam dalam penyelenggaraan Majelis Taklim sangat diperlukan. Banyak kegiatan yang sifatnya kolektif saat ini tidak dapat berlanjut sesuai yang diharapkan mengingat kurang kompaknya para penyelenggara organisasi atau suatu lembaga. Begitu pula dengan penyelenggaraan Majelis Taklim seyogyanya mendapatkan dukungan masyarakat terutama yang berada di sekitar lingkungan Majelis Taklim diselenggarakan. Kebersamaan umat Islam dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, terbagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. Kebersamaan dalam Publikasi, yakni kebersamaan masyarakat Islam mempublikasikan kepada masyarakat sekitar Majelis Taklim yang akan diselenggarakan agar eksistensinya diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga Majelis Taklim memiliki peserta didik yang cukup.
- b. Kebersamaan dalam Pendanaan, yakni kebersamaan masyarakat Islam untuk berpartisipasi mendanai penyelenggaraan Majelis

Taklim baik karena ia sebagai anggota maupun tidak termasuk anggota Majelis Taklim. Apabila ia bukan anggota Majelis Taklim, maka ia telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan mengharapkan ridha Allah swt.

- c. Kebersamaan dalam Motivasi, yakni kebersamaan masyarakat Islam dalam memberikan motivasi kepada warga masyarakat agar tetap memiliki rasa simpati dan empati kepada Majelis Taklim sehingga baik anggota Majelis Taklim tetap termotivasi untuk tetap menjadi anggota. Dan bagi warga masyarakat yang bukan anggota Majelis Taklim tetap bersimpati terhadap keberlangsungan Majelis Taklim.
- d. Kebersamaan dalam Pengawasan, yakni kebersamaan masyarakat Islam dalam mengawasi seluruh aktivitas Majelis Taklim. Pengawasan yang dimaksudkan adalah bukan yang berkaitan dengan keuangan, akan tetapi mengkhusus kepada jenis aktivitas Majelis Taklim untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ada salah seorang anggota Majelis Taklim yang terpengaruh paham radikal dan menyebarkan paham radikal tersebut kepada anggota Majelis Taklim lainnya. Maka tindakan masyarakat sekitar adalah bersama-sama memberikan nasehat kepada salah satu anggota Majelis Taklim yang menyebarkan paham radikal tersebut.

## **B. Tantangan Penyelenggaraan Majelis Taklim**

Dalam penyelenggaraan Majelis Taklim tidak luput dari tantangan atau kendala. Tantangan tersebut, antara lain:

### **1. Era Globalisasi**

Era globalisasi tidak dapat dipungkiri saat ini. Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak positif bagi perkembangan perekonomian manusia. Namun di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang telah mengglobal, disadari atau tidak, memberikan implikasi dalam kehidupan beragama. Misalnya, kesenderungan masyarakat Islam lebih mengutamakan melihat tayangan televise bila dibandingkan mengikuti pertemuan Majelis Taklim. Implikasinya adalah pudarnya hubungan silaturrahmi sesama umat Islam.

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Majelis Taklim adalah meningkatkan hubungan silaturrahmi dengan kegiatan Majelis Taklim dengan terjadinya interaksi antara satu individu Islam dengan individu muslim lainnya. Dan hal ini tidak dimiliki oleh sarana informasi lainnya.

Era globalisasi ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu kendala utama melainkan menjadi tantangan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim ke depan agar misi utama Majelis Taklim dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Bahkan dengan era globalisasi ini dapat dijadikan sarana yang aktual untuk mengaplikasikan materi Majelis Taklim dengan tidak meninggalkan fungsinya yang sesunggunhnya. Misalnya, pemanfaatan internet secara kolektif yang berbasis pengetahuan Islam yang dipandu oleh pembina atau narasumber pada setiap pertemuan peserta didik.

## 2. Dekadensi Moral

Dekadensi moral manusia merupakan salah satu kendala penyelenggaraan Majelis Taklim. Di antaranya adalah sifat ego yang berlebihan dan atau kecintaan terhadap harta secara berlebihan. Akibatnya sifat ini sering terbawa pada penyelenggaraan Majelis Taklim. Sebagaimana contoh konkret, adalah setiap pertemuan Majelis Taklim para anggota Majelis Taklim yang didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga lebih mementingkan acara arisan daripada *taklim* dan *ta'dif* sebagai fungsi utama Majelis Taklim.

Hal tersebut sebagai indikator terjadinya dekadensi moral masyarakat Islam yang merupakan tantangan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim saat ini. Namun hal ini tidak dapat menjadi penghalang mengingat tidak secara umum orang dihinggapi penyakit masyarakat ini. Justru dengan eksistensi Majelis Taklim sebagai penetrasi karakter buruk manusia. Dekadensi moral merupakan salah satu tugas dan tantangan bagi Majelis Taklim untuk membenahi hal tersebut.

## 3. Pengutamaan Urusan Dunia

Sebahagian masyarakat Islam lebih cenderung kepada kegiatan yang bersifat duniawi yang dapat memberikan hal bersifat materi dan kurang

kecenderungan mengejar amaliyah untuk persiapan dan bekal di akhirat kelak. Majelis Taklim adalah wadah untuk menumbuhkan silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah. Majelis Taklim adalah wadah untuk menuntut pengetahuan Islam di luar pendidikan formal yang seharusnya menjadi perhatian seluruh umat Islam. Namun tidak seluruh masyarakat Islam menyadari sepenuhnya manfaat ini, dan mereka lebih memilih urusan dunia semata. Hal ini juga merupakan tugas dan tantangan bagi penyelenggara Majelis Taklim untuk menyadarkan mereka agar dapat mencintai wadah ini yang mengembangkan misi pendidikan, etika dan moral.

### **C. Harapan Penyelenggaraan**

#### **1. Membangun Manusia yang Beriman**

Penyelenggaraan Majelis Taklim merupakan wadah untuk membangun manusia yang beriman dan meningkatkan kecerdasan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan wawasan keislaman. Membangun manusia yang beriman adalah suatu hal yang mutlak bagi penyelenggaraan Majelis Taklim sebagai pendidikan keagamaan di luar sekolah. Dan hal tersebut merupakan wujud partisipasi lembaga pendidikan nonformal bidang agama. Dan begitu pula pengetahuan yang belum diperoleh pada lembaga pendidikan formal diperoleh melalui Majelis Taklim. Atau pernah dipelajari di sekolah dan diulangi pada Majelis Taklim sehingga materi pengetahuan Islam dapat lebih dipahami. Dan dengan pengetahuan keislaman yang didapatkan, maka anggota Majelis Taklim yang sekaligus peserta didik Majelis Taklim. Dengan pengetahuan Islam yang diperolehnya melalui Majelis Taklim, maka dengan sendirinya iman dapat bertambah. Hal inilah yang disebut Majelis Taklim sebagai tempat membangun manusia yang beriman.

#### **2. Peningkatan Hubungan Silaturrahmi dan *Ukhuwah Islamiyah***

Aktivitas yang ada pada Majelis Taklim adalah meningkatkan hubungan silaturrahmi dan *ukhuwah Islamiyah*. Hubungan silaturrahmi yang dimaksud adalah terjadinya interaksi antara individu muslim yang satu dengan individu muslim yang lainnya sehingga terjadi keakraban, persahabatan dan persaudaraan. Interaksi individu muslim pada Majelis

Taklim berbeda situasinya dengan interaksi seorang muslim ketika berada di pasar, pantai, atau tempat umum lainnya. Interaksi yang terjadi pada Majelis Taklim diwarnai oleh hubungan yang didasari oleh agama sebagai pedoman sehingga interaksi tersebut tetap didasari oleh kaidah Islam. Ketika manusia tidak melakukan interaksi sosial kepada sesamanya, maka hubungan silaturrahmi semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dengan adanya Majelis Taklim ini menjadi wadah meningkatkan silaturrahmi sesama umat Islam yang diharuskan oleh ajaran Islam.

Kemudian Majelis Taklim juga meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* yang pada gilirannya memperkuat posisi agama Islam dalam usaha pengembangannya. Pengembangan ajaran Islam secara kualitas tidak dapat terwujud secara optimal apabila tidak didasari oleh *ukhuwah Islamiyah*. Peran Majelis Taklim dalam peningkatan *ukhuwah Islamiyah* adalah susnability program pengembangan pengetahuan Islam melalui pendidikan keagamaan nonformal.

### 3. Tripusat dalam Masyarakat

Penyelenggaraan Majelis Taklim memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni Majelis Taklim sebagai pusat ilmu dalam masyarakat di luar sekolah dalam bidang agama. Karena Majelis Ta'lim merupakan pusat *ta'lim* (ilmu), seyogyanya mempertahankan eksistensinya agar proses pelaksanaannya mendapatkan simpati dan empati masyarakat. Tripusat Majelis Taklim dalam masyarakat dalam bidang agama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian:

- a. Pusat Informasi Perkembangan Pengetahuan Islam
- b. Pusat Pembinaan Pengetahuan Islam
- c. Pusat Konsultasi Agama Islam.

Pusat ilmu dalam masyarakat secara kualitas mungkin tidak dapat dipersamakan dengan pengembangan ilmu pengetahuan keislaman pada perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengkajian lainnya. Namun secara kuantitas melalui Majelis Taklim, ilmu tentang agama Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok desa dan Majelis Taklimlah yang paling dekat

dengan masyarakat hingga ke pelosok desa. Dan hal ini merupakan damba dan harapan yang besar bagi umat Islam.

## PENUTUP

Dasar penyelenggaraan Majelis Taklim, di antaranya adalah: (a) kebijakan Pemerintah yang meliputi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan KMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; (b) pembiayaan yakni sumber pembiayaan dan penggunaan dana yang meliputi: penggunaan dana keperluan organisasi, penggunaan dana keperluan pembinaan dan pengembangan, serta penggunaan dana komsumsi dan penyelenggaraan acara; (c) dan fungsi manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim yang meliputi: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (perencanaan), dan *controlling* (pengawasan); (d) pemanfaatan sumber daya manusia, yakni pemanfaatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Majelis Taklim sangat diperlukan untuk terlaksananya seluruh aktivitas Majelis Taklim; dan (e) peserta didik, yakni peserta didik turut memberikan andil atas penyelenggaraan Majelis Taklim yang sekaligus anggota Majelis sehingga Majelis Taklim dapat dilangsungkan secara kontinyu.

Tantangan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, antara lain: (a) era globalisasi, yakni perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak positif bagi perkembangan perekonomian manusia. Namun di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang telah mengglobal, disadari atau tidak, memberikan implikasi dalam kehidupan beragama; (b) Dekadensi moral manusia merupakan salah satu kendala penyelenggaraan Majelis Taklim dan (c) Pengutamaan urusan dunia, yakni sebahagian masyarakat Islam lebih cenderung kepada kegiatan yang bersifat duniawi yang dapat memberikan hal bersifat materi dan kurang kecenderungan mengejar amaliyah untuk persiapan dan bekal di akhirat kelak.

Harapan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, di antaranya: (a) membangun manusia yang beriman dan meningkatkan kecerdasan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan wawasan keislaman. Membangun manusia yang beriman adalah suatu hal yang mutlak bagi penyelenggaraan Majelis Taklim sebagai pendidikan keagamaan di luar sekolah; (b) Peningkatan Hubungan Silaturrahmi dan *Ukhuwah Islamiyah*, yakni aktivitas yang ada pada Majelis Taklim adalah meningkatkan hubungan silaturrahmi dan *ukhuwah Islamiyah*. Hubungan silaturrahmi yang dimaksud adalah terjadinya interaksi antara individu muslim yang satu dengan individu muslim yang lainnya sehingga terjadi keakraban, persahabatan dan persaudaraan; dan (c) tripusat dalam masyarakat, yakni penyelenggaraan Majelis Taklim memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni Majelis Taklim sebagai pusat ilmu dalam masyarakat di luar sekolah dalam bidang agama. Majelis Taklim sebagai pusat ilmu dalam masyarakat dalam bidang agama dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yang meliputi: pusat informasi perkembangan pengetahuan Islam, pusat pembinaan pengetahuan Islam, dan pusat konsultasi agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Suryoto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Cet.I; PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toga Putra Semarang, 2002.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Cet. 12; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, <http://ngada.org/bln.232-2012.htm>.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, [www.kemenag.go.id/file/dokumen.pp5507.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/dokumen.pp5507.pdf).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sagaf. *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam*. Cet. 1; Jakarta; Ip4m Press, 2009.

Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Cet. 4; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.